

**RUMUSAN**  
**PERTEMUAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN (RAKORBUN)**  
**SE KALIMANTAN TIMUR**  
**TANGGAL 24 – 25 APRIL 2014**  
**DI SAMARINDA**

Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorbun) Tahun 2014 yang di laksanakan di Samarinda pada tanggal 24 – 25 April 2014 se Kalimantan Timur dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur. Setelah mendengarkan arahan Gubernur Kalimantan Timur DR. H. Awang Faroek Ishak serta narasumber Prof. M. Firdaus, Ph.D dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Direktur Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, Sulistyowati dari Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Staf Ahli dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bidang lingkup Perkebunan Kabupaten/Kota, Para Pelaku Perusahaan Perkebunan, Ketua Asosiasi Petani Perkebunan se Kalimantan Timur. Adapun rumusan yang diperoleh dari hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan tahun 2014 se Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Mengingat peran perkebunan di dalam pembangunan sangat penting dan strategis dalam Pembangunan Nasional, lebih khusus secara regional di Kalimantan Timur terutama untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah, daya saing serta pemenuhan konsumsi dalam negeri dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan maka masing-masing pemangku kepentingan di dalam bidang perkebunan bersepakat untuk melanjutkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi bahwa Ijin Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Bupati sampai tahun 2014 adalah seluas 2.343.235,49 Ha untuk 187 PBS. Dari Ijin tersebut maka luas HGU yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah 1.057.729,91 Ha untuk 127 PBS. Sedangkan realisasi tanam untuk Kebun Inti adalah 778.355,21 Ha untuk Kebun Plasma adalah 163.065,95 Ha sedangkan total Inti dan Plasma adalah 941.421 Ha. Kemudian realisasi pembangunan Kebun Rakyat adalah 124.130 Ha sehingga realisasi total luas Kebun Inti, Kebun Plasma dan Kebun Rakyat adalah 1.065.551,16 Ha. Dari luasan IUP 2.343.235,49 Ha maka tersisa luas lahan 1.401.814, 33 Ha. Pada tahun 2014 di Kalimantan Timur telah dibangun 55 pabrik pengolah TBS dan 10 pabrik pengolah TBS dalam proses perizinan diharapkan tahun 2015 dapat terealisasi pembangunan pabriknya.
3. Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Dinas Perkebunan se Kalimantan Timur tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 April 2014 di Samarinda telah disepakati kontribusi Kabupaten/Kota untuk mengembangkan 2 juta Ha Kelapa Sawit (1 Juta Ha tahap II) sebagai berikut :
  - a. Kabupaten Kutai Timur seluas 292.00 Ha (Pola PBS 236.000 Ha, dan Perkebunan Rakyat 56.000 Ha)
  - b. Kabupaten Kutai Kertanegara seluas 240.000 Ha (Pola PBS 200.000 Ha, dan Perkebunan Rakyat 40.000 Ha)
  - c. Kabupaten PPU seluas 18.000 Ha (Pola PBS 15.000 Ha dan Perkebunan Rakyat 3.000 Ha).
  - d. Kabupaten Paser seluas 34.000 Ha (Pola PBS 28.000 Ha dan Perkebunan Rakyat 6.000 Ha).

- e. Kabupaten Kutai Barat seluas 288.000 Ha (Pola PBS 238.000 Ha dan Perkebunan Rakyat seluas 50.000 Ha).
- f. Kabupaten Berau seluas 100.000 Ha (Pola PBS 80.000 Ha dan Perkebunan Rakyat seluas 20.000 Ha).
- g. Kota Samarinda seluas 3.000 Ha (Perkebunan Rakyat)
- h. Kabupaten Mahakam Hulu seluas 20.000 Ha (Pola PBS 16.000 Ha dan Perkebunan Rakyat 4.000 Ha)
- i. Provinsi seluas 5.000 Ha (Pembangunan Perkebunan Rakyat sepanjang Kiri-Kanan Jalan Trans Kalimantan)

Guna mendukung program Gubernur Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018 dalam membangun Kebun Kelapa Sawit tahap ke II di Kalimantan Timur seluas 1.401.814,33 Ha perlu didukung oleh tiga pilar yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat secara bersama-sama guna mewujudkan program tersebut, untuk memastikan luasan sisa tanaman yang ada pada PBS, agar PBS segera menyampaikan data peta titik koordinat pada masing-masing wilayah kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

- 4. Perlu melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan dan Perusahaan Perkebunan yang berkaitan dengan percepatan Revitalisasi Perkebunan yang pro rakyat mengingat realisasi pembangunan kebun kemitraan saat ini baru mencapai sekitar 15 %, disamping hal tersebut perlu penyelesaian konflik, sengketa dengan masyarakat di sekitar kebun pada beberapa PBS dan melaporkan penggunaan dana Non Revitbun terhadap realisasi pembangunan kebun.
- 5. Untuk meningkatkan nilai tambah dari CPO guna memenuhi kebutuhan konsumsi Dalam Negeri dan Dalam Negeri, agar hasil CPO dapat diproses menjadi produk turunannya seperti minyak goreng, margarine dan produk turunan lainnya, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah untuk kemakmuran masyarakat.
- 6. Dalam rangka mendukung program Integrasi Sawit Sapi di Kalimantan Timur, agar semua Pemangku Kepentingan terus melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh PBN, PBS dan Masyarakat Pekebun, dengan mengadopsi saran dari hasil Penelitian PPKS Medan dan pola-pola Integrasi Sawit Sapi yang sudah berkembang di beberapa Provinsi lain. Draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Integrasi Sawit Sapi masih belum final oleh karena itu daerah agar memberikan masukan guna penyempurnaannya.
- 7. Untuk mendukung Pembangunan Perkebunan di Kalimantan Timur, agar setiap Pemangku Kepentingan memanfaatkan Teknologi Informasi mengenai pemetaan wilayah kebun melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional guna menuju Satu Data Satu Peta di Kalimantan Timur, serta pemanfaatan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) berkaitan dengan One Map Policy.
- 8. Untuk mendukung pengembangan 5 (lima) komoditi unggulan Kalimantan Timur (Kelapa Sawit, Karet, Lada, Kakao dan Kelapa) agar dilaksanakan sesuai dengan kaidah kultur teknis dan dapat dikembangkan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi guna mendukung peningkatan produksi perkebunan berkelanjutan, serta mengembangkan diversifikasi dengan memadukan beberapa komoditi dalam satu hamparan.

9. Dalam peningkatan kemampuan dan kelembagaan dari Asosiasi Petani, Gapoktan dan Kelompok Tani perlu Penguatan Kelembagaan melalui Pelatihan dan Penguatan Kelembagaan guna mengatasi persoalan yang timbul di dalam usaha taninya.
10. Khusus untuk mengantisipasi isu-isu lingkungan negatif yang berkembang pada saat ini maka sub sektor perkebunan tetap berkomitmen untuk melakukan pembangunan perkebunan berkelanjutan yaitu melalui Penilaian Usaha Perkebunan dan akan ditindaklanjuti sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) serta penerapan 7 prinsip ISPO.
11. Untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan perlu penggunaan benih unggul bermutu secara 5 (lima) tepat yaitu tepat jumlah, tepat mutu, tepat lokasi, tepat harga dan tepat pelayanan.
12. Perlu peningkatan kewaspadaan akan terjadinya kebakaran lahan dan kebun, oleh karena itu diharapkan para pemangku kepentingan pada sektor perkebunan baik Kabupaten/Kota untuk terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun, seperti telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
13. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten/Kota perlu dilaksanakan sinkronisasi dalam perencanaan agar pelaksanaan lebih terpadu sehingga dapat saling mendukung antara Perencanaan Pembangunan perkebunan ditingkat Pusat, Provinsi dan Perencanaan Pembangunan Perkebunan ditingkat Kabupaten/Kota.
14. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai harapan maka agar semua para pemangku kepentingan lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/Kota se Kalimantan Timur agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk mendukung pengelolaan Anggaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar semua menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rumusan Pertemuan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan tahun 2014 untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**TIM PERUMUS**